

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PADA INDUSTRI BATU BATA
(Studi Kasus Desa Tanjung Mulia
Kecamatan Pagar Merbau
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH:

**MUTIA AISYAH PUTRI
NPM. 208520074**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PADA INDUSTRI BATU BATA
(Studi Kasus Desa Tanjung Mulia
Kecamatan Pagar Merbau
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

MUTIA AISYAH PUTRI
NPM. 208520074

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : MUTIA AISYAH PUTRI
NPM : 208520074
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol
Tanggal 12 September 2024


Mengetahui

Dekan



Dr. Walid Mustafa S., S.Sos
Tanggal 23 September 2024

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Indra Muda, M. AP
Tanggal 12 September 2024

Tanggal Lulus: 02 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR, SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Aisyah Putri
NPM : 208520074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir, skripsi/ tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 September 2024


Mutia Aisyah Putri
208520074

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jatirejo pada tanggal 21 Februari 2002 dari Ayah Jamhur dan Ibu Umi Kalsum Barus. Penulis merupakan anak kedua berjenis kelamin perempuan dari dua bersaudara. Penulis beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia.

Tahun 2020 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

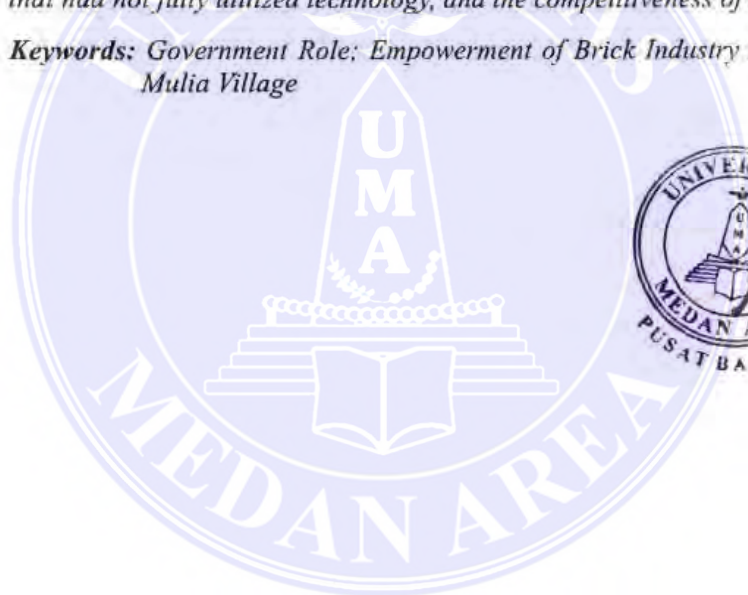
Perkembangan UMKM industri batu bata terus meningkat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau, sehingga peranan pemerintah sangat penting untuk pemberdayaan UMKM industri batu bata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau serta menganalisis faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan pemerintah oleh Yusuf Ilyas (2014), dengan menggunakan metodologi jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata di Desa Tanjung Mulia sudah efektif, dibuktikan oleh peranan pemerintah sebagai regulator memberikan kontribusi seperti bentuk perizinan usaha dan modal usaha. Peranan pemerintah sebagai dinamisator membuat program kolaborasi dengan kemitraan, peranan pemerintah sebagai fasilitator memberikan fasilitas pemasaran dengan suatu kemitraan. Hambatan dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata yaitu kurangnya ketersediaan modal, proses produksi batu bata yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi, dan daya saing penjualan batu bata.

Kata Kunci: Peranan Pemerintah; Pemberdayaan UMKM Industri Batu Bata; Desa Tanjung Mulia

ABSTRACT

The development of the brick industry MSMEs continued to increase in Tanjung Mulia Village, Pagar Merbau Subdistrict, making the government's role very important for empowering brick industry MSMEs. The purpose of this research was to identify and describe the government's role in empowering brick industry MSMEs in Tanjung Mulia Village, Pagar Merbau Subdistrict, and to analyze the inhibiting factors in the empowerment of MSMEs in the brick industry. The theory used in this research was the theory of government roles by Yusuf Ilyas (2014), employing a qualitative methodology. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that the government's role in empowering brick industry MSMEs in Tanjung Mulia Village was effective, as evidenced by the government's role as a regulator, contributing to business licensing and capital. The government's role as a dynamizer was seen in its collaborative programs with partnerships, and its role as a facilitator provided marketing facilities through partnerships. The obstacles in empowering brick industry MSMEs were the lack of available capital, the brick production process that had not fully utilized technology, and the competitiveness of brick sales.

Keywords: *Government Role; Empowerment of Brick Industry MSMEs; Tanjung Mulia Village*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya persembahkan ke hadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)”**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Walid Mustafa S, S.Sos. M.I.P selaku Dekan Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs.Indra Muda, M. AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing saya.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB., M.AB selaku Sekretaris skripsi saya.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA selaku Penguji skripsi saya.
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Jamhur, Ibu Umi Kalsum Barus dan Abang Kandung satu-satunya Calvin Syah Hafiz sebagai figur yang paling berpengaruh dalam perjalanan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis,

Mutia Aisyah Putri

DAFTAR ISI

Halaman

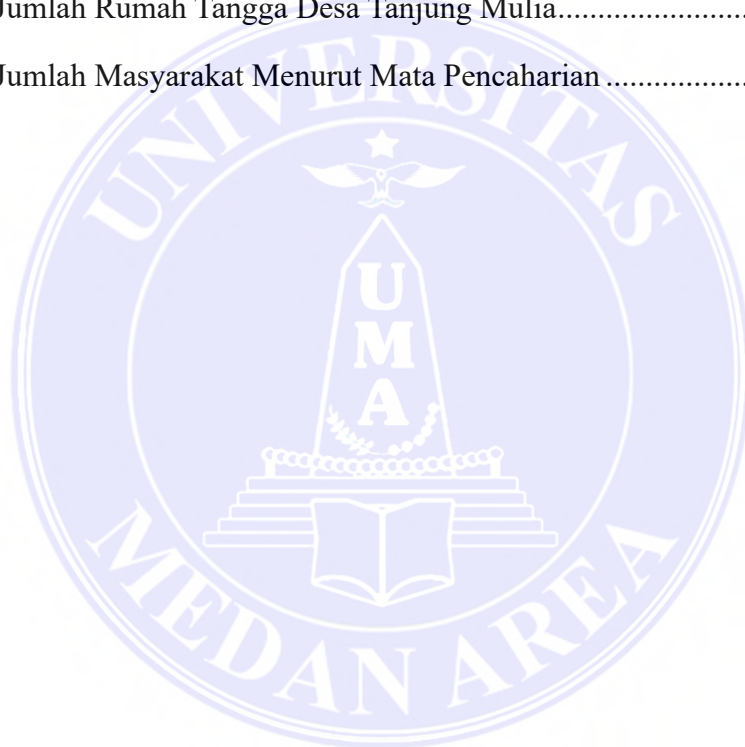
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peranan	8
2.2 Peranan Pemerintah	9
2.3 Pemberdayaan	11
2.3.1 Indikator Pemberdayaan	12
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan.....	15
2.3.3 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	16
2.3.3.1 Pemberdayaan UMKM	16
2.3.3.2 Peraturan Pemberdayaan UMKM Kab.Deli Serdang	18
2.3.3.3 Peran UMKM di Indonesia	20
2.4 Industri Batu Bata.....	22
2.5 Kerangka Berpikir	24
2.6 Penelitian Terdahulu	25
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	31
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2 Jadwal Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
3.6 Triangulasi Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	40
4.1.1 Letak Geografis.....	40
4.1.2 Topografi.....	41
4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang	41
4.2.1 Lokasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang	41
4.2.2 Susunan Organisasi.....	43

4.2.3 Visi dan Misi.....	43
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Pagar Merbau.....	44
4.4 Gambaran Umum Desa Tanjung Mulia.....	45
4.4.1 Sejarah Desa Tanjung Mulia.....	45
4.4.2 Letak Geografis.....	46
4.4.3 Keadaan Penduduk Desa Tanjung Mulia.....	47
4.4.4 Visi dan Misi.....	49
4.5 Perkembangan Industri Batu Bata Di Desa Tanjung Mulia	50
4.6 Hasil Pembahasan.....	52
4.6.1 Peranan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemberdayaan UMKM Industri Batu Bata	52
4.6.2 Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Industri Batu Bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.....	80
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Kelurahan Dan Industri Batu Bata Kab.Deli Serdang	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3 Jadwal Penelitian	32
Tabel 4 Informan Penelitian	33
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Mulia	47
Tabel 6 Jumlah Rumah Tangga Desa Tanjung Mulia	48
Tabel 7 Jumlah Masyarakat Menurut Mata Pencaharian	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Jumlah UMKM Di Indonesia	22
Gambar 2 Kerangka Berpikir	24
Gambar 3 Denah Lokasi Penelitian.....	31
Gambar 4 Triangulasi Sumber	39
Gambar 5 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab.Deli Serdang	42
Gambar 6 Kantor Desa Tanjung Mulia Kec. Pagar Merbau	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa dicapai melalui peningkatan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM sangat penting bagi ekonomi global, karena mereka berfungsi sebagai pilar fundamental ekonomi dunia. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah besar entitas bisnis di berbagai sektor, yang sangat berkontribusi pada peluang kerja dan berfungsi sebagai sarana untuk menambah pendapatan, terutama di daerah pedesaan dan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membentuk landasan perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UKM menyumbang 99% dari semua badan usaha, berkontribusi 60,5% terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB), dan mempekerjakan 96,9% tenaga kerja.

Peraturan kebijakan UMKM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jenis usahanya, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pemerintah menerapkan strategi pemberdayaan UMKM ini untuk memperkuat perekonomian dan mendorong kemajuan di berbagai daerah. Kebijakan pemberdayaan UMKM diuraikan dalam PP No. 7 Tahun 2021, yang berfokus pada fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan

koperasi dan UMKM, penyelenggaraan inkubasi, dan alokasi dana khusus untuk meningkatkan kenyamanan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup ketentuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan dukungan bagi koperasi dan UMKM.

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia, secara aktif terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dengan mengembangkan UMKM ini memiliki kapasitas untuk mewujudkan potensi ekonomi daerah, sehingga mendorong kerjasama ekonomi regional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu langkah tersebut adalah pelaksanaan program wirausaha *start-up*, yang dibiayai melalui sumbangan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari bank Sumut. Sumbangan ini berupa alat dan bahan yang dibagikan kepada anak muda yang tidak berkerja dan keluarga yang membutuhkan. Program yang dirancang oleh gerbang swara, lembaga swadaya masyarakat, bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan UMKM, dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, program ini menandakan komitmen pemerintah untuk membina kerjasama UMKM dengan masyarakat.

Kemajuan UMKM di Sumatera Utara cukup baik, dengan total 2,8 juta badan usaha saat ini beroperasi di provinsi ini. Kehadiran substansial ini secara signifikan berkontribusi pada kemajuan ekonomi Sumatera Utara. Pengembangan UMKM difasilitasi melalui pelaksanaan berbagai program sosial dan inisiatif pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan magang

kewirausahaan dan inkubator bisnis. Selanjutnya, pemerintah memperluas dukungannya dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM), bersama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Provinsi Sumatera Utara mencakup banyak kabupaten, salah satunya adalah Deli Serdang. Untuk mendorong kemajuan UMKM, pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan insentif kepada peserta UMKM untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya berkualitas tinggi. Strategi ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dari komunitas yang lebih luas dan membangun keunggulan kompetitif. Pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mempercepat kebangkitan produk-produk buatan lokal, khususnya berfokus pada dominasi produk UMKM berkualitas tinggi di pasar domestik dan daya saing mereka di pasar global. Layanan Koperasi memainkan peran penting dalam proses ini, dan posisinya sedang diperkuat untuk secara efektif mengumpulkan dan memobilisasi potensi ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Dengan demikian, koperasi, sebagai badan hukum, mampu memenuhi perannya dalam menjalankan bisnis yang makmur, kuat, mandiri, dan tangguh, sehingga mendorong kesejahteraan anggotanya.

Kecamatan Pagar Merbau merupakan salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tepatnya berada di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan ini memiliki salah satu UMKM yang bergerak dibidang industri,

yaitu industri batu bata. Kecamatan Pagar Merbau memiliki jumlah desa yang cukup banyak dan hampir seluruh desa memiliki UMKM industri batu bata.

Tabel 1
Jumlah Desa/Kelurahan Dan UMKM Industri Batu Bata Di Kabupaten Deli Serdang

No	Kecamatan	Industri Batu Bata
1	Bandar Dolok	-
2	Tanjung Garbus II	-
3	Perbarakan	-
4	Tanjung Garbus KP	8
5	Tanjung Mulia	71
6	Purwodadi	64
7	Sukamulia	34
8	Sidodadi	8
9	Jatirejo	11
10	Jatibaru	5
11	Pasar Miring	23
12	Pagar Merbau I	-
13	Pagar Merbau II	-
14	Sukamandi Hulu	-
15	Sukamandi Hilir	-
	Total	224

Sumber: Data Pimer

Data pada tabel 1 dipaparkan terdapat 15 desa yang ada di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Dapat dilihat bahwa kecamatan Pagar Merbau memiliki 224 industri batu bata. Dari data tabel 1 dapat dilihat, Desa Tanjung Mulia adalah salah satu desa yang memiliki jumlah industri batu bata terbanyak. Jumlah industri batu bata di Desa Tanjung Mulia yaitu sebesar 71 industri batu bata.

Desa Tanjung Mulia adalah lokasi yang saya pilih untuk melakukan penelitian. Desa Tanjung Mulia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. UMKM yang banyak

diusahakan oleh masyarakat di desa ini adalah industri batu bata. Batu bata merupakan usaha perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan batu bata merah. Batu bata merah dibuat dengan bahan baku tanah merah, tanah galong, pasir dan air. Kemudian dicetak melalui mesin potong atau masyarakat sekitar menyebutnya mesin compreng. Setelah dicetak lalu dijemur dan dikeringkan dibawah sinar matahari dan kemudian dimasukan ke tungku pembakaran (dapur bakar). Setelah merah atau matang kemudian dipasarkan dengan harga tertentu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.

Perkembangan UMKM industri batu bata terus meningkat dan berkembang di Desa Tanjung Mulia, sehingga membuat mata pencaharian masyarakat setempat rata rata berkerja di industri batu bata. Dengan berkembangnya industri batu bata ini, pemerintah desa setempat harus memberikan pemberdayaan UMKM yang efektif dengan tujuan untuk pembangunan di desa setempat dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal tersebut, diperlukannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pengelola industri batu guna menunjang keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata.

Industri batu bata ini terdapat beberapa kendala sehingga yang dapat merugikan bagi pengelola industri batu bata dan pemerintah setempat. Kendala tersebut timbul dari masalah kurangnya ketersediaan modal dari para pengelola industri bata yang menyebabkan gaji para pekerja terhambat dan tidak seimbang. Selain itu pula harga dari beberapa industri batu bata berbeda beda dan kondisi cuaca yang berubah ubah dapat mempengaruhi produksi batu bata sekaligus harga pasaran dari batu bata yang naik atau pun turun. Oleh karena

itu, agar dapat memberdayakan kesejahteraan untuk masyarakat setempat, pemerintah setempat memiliki peran penting disini, pemerintah setempat harus lebih memberdayakan dengan strategi pengembangan guna menunjang pembangunan daerah melalui UMKM industri batu bata ini.

Atas uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh, yang tertuang dalam Skripsi berjudul: “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada industri industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah

(UMKM) pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

2. Untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan masukan informasi tentang peranan pemerintah desa terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) industri batu bata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan menurut terminology didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diantisipasi dimiliki individu dalam masyarakat. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang selaras dengan posisi seseorang menandakan pemenuhan suatu peran. Perbedaan antara posisi dan peran memiliki signifikansi dalam ranah penyelidikan ilmiah. Kedua entitas ini secara intrinsik terkait, karena masing-masing sangat bergantung pada yang lain.

Riyadi (2002) berpendapat bahwa peranan dapat diartikan sebagai disposisi dan ideologi peran yang dilakukan oleh pihak dalam perlawanan masyarakat. Dengan mengambil peran ini, pelaku, baik individu atau institusi, akan berperilaku sesuai dengan antisipasi individu atau lingkungannya.

Veitzal Rivai (2004) mendefinisikan peranan sebagai perilaku individu yang mapan dan diantisipasi dalam posisi tertentu. Menurut Soejono Soekanto (2012), konsep peran meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau status sosial individu. Dalam konteks ini, peran dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengarahkan keterlibatan individu dalam kehidupan di masyarakat.
2. Peran mewakili kapasitas individu untuk berkontribusi pada fungsi masyarakat sebagai bagian dari entitas yang terorganisir.
3. Peran dapat dianggap sebagai kontribusi signifikan individu terhadap tatanan sosial masyarakat.

Beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan merupakan suatu bentuk tindakan dari seseorang yang memiliki kedudukan dan pengetahuan untuk menjalankan tugas sebagaimana berhubungan dengan norma-norma yang berjalan di masyarakat dan memenuhi harapan atau keinginan dari masyarakat sekitar.

2.2 Peranan Pemerintah

Talidzu Ndraha (2011), menyatakan peranan pemerintah melibatkan pemenuhan persyaratan entitas yang diatur sehubungan dengan layanan publik dan layanan sipil yang tidak diprivatisasi untuk setiap individu pada titik kebutuhan, sehingga menghasilkan koneksi transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menyediakan berbagai macam barang kepada masyarakat umum, dengan setiap opsi mewakili komitmen.
2. Setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih item yang sesuai dengan aspirasi mereka. Kebebasan individu ini dijaga dan dijamin melalui layanan sipil.
3. Dalam hal konsumen memutuskan antara produk yang tersedia, itu adalah tugas produsen/penjual (pemerintah) untuk menegakkan komitmen mereka.
4. Untuk menilai apakah janji telah dipenuhi, konsumen melakukan pengawasan sosial atas produk yang mereka terima.
5. Jika ditentukan bahwa janji telah ditegakkan, itu menunjukkan bahwa produsen (pemerintah) bertanggung jawab; jika tidak, produsen harus menghadapi konsekuensi.

6. Ketika produsen (pemerintah) dianggap bertanggung jawab, itu menumbuhkan kepercayaan pada janji-janji yang dibuat kepada konsumen (masyarakat).

Teori peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang terdiri dari beberapa komponen yang dikemukakan oleh Ilyas Yusuf (2014) peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yaitu:

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peranan pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan pedoman pengelolaan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan bimbingan penting kepada masyarakat, khususnya pengelola industri batu bata di Desa Tanjung Mulia, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inisiatif pemberdayaan.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peranan pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat ketika menghadapi hambatan dalam proses pembangunan, dengan tujuan mendorong pembangunan daerah. Hal ini dicapai melalui pemberian bimbingan dan arahan yang efisien dari pemerintah kepada masyarakat yang mengelola industri batu bata di Desa Tanjung Mulia. Biasanya, bimbingan diberikan melalui tim atau organisasi khusus yang menawarkan program pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peranan pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan

daerah. Sebagai pelaksana dan penyedia fasilitas bagi masyarakat, terutama bagi pengelola industri batu bata di Desa Tanjung Mulia, pemerintah harus mendukung segala bentuk manajemen yang berkontribusi pada pemberdayaan melalui berbagai sarana teknis, strategis, dan praktis.

2.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari istilah “kekuatan”, yang menunjukkan kekuatan atau “kemampuan,” yang lebih dikenal sebagai “Kekuatan” dalam bahasa Inggris. Istilah “pemberdayaan” atau “pemberdayaan” digunakan untuk mencakup konsep perencanaan, proses, dan upaya yang bertujuan untuk memperkuat atau memungkinkan segmen masyarakat yang lebih lemah.

Adapun definisi-definisi pemberdayaan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Soeharto (2008), pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan memerlukan serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kelompok terpinggirkan dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan berusaha membawa perubahan sosial dengan memungkinkan masyarakat, kelompok, dan individu memiliki kekuatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka.
2. Menurut Nugroho (2001), pemberdayaan adalah strategi pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip masyarakat. Semua upaya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pemberdayaan diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat, dengan

bimbingan yang diberikan oleh badan atau lembaga pemerintah tertentu untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.

3. Menurut Eko (2004), pemberdayaan adalah gerakan dan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, menumbuhkan peradaban, dan mempromosikan kemandirian masyarakat.
4. Menurut Suhendra (2006), pemberdayaan digambarkan sebagai aktivitas dinamis dan berkelanjutan yang secara sinergis merangsang keterlibatan semua potensi evolusi yang ada bersama dengan keterlibatan semua potensi.

Beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan perubahan dari kondisi yang sebelumnya menjadi lebih baik untuk masyarakat dengan pendampingan oleh pemerintah.

2.3.1 Indikator Pemberdayaan

Dalam buku Edi Suharto (2009) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Pemberdayaan dianggap sebagai proses perkembangan yang berasal dari pertumbuhan individu dan kemudian transisi ke transformasi sosial yang lebih luas.

2. Pemberdayaan memerlukan keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa percaya diri yang mendalam, utilitas, dan kemampuan untuk melakukan kontrol atas diri sendiri dan orang lain.

3. Pencapaian pembebasan berasal dari gerakan sosial yang berasal dari pendidikan dan politisasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang menghasilkan pembebasan mereka.

Zubaedi (2013) dalam buku pengembangan masyarakat, memberikan penjelasan tentang perspektif konsep pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. *Perspektif Pluraris*

Pemberdayaan dianggap sebagai proses membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk secara efektif mengejar tujuan mereka, terutama dengan memperoleh keahlian dalam lobi politik untuk meningkatkan kemampuan mereka.

2. *Perspektif Struktularis*

Pemberdayaan dianggap sebagai proses pembebasan yang memerlukan transformasi struktural yang signifikan dan pemberantasan penindasan sistemik.

3. *Perspektif Elits*

Pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memberikan pengaruh pada kelas penguasa, dicapai melalui pembentukan aliansi dan pengejaran perubahan dalam barisan mereka. Inisiatif ini muncul dari kesadaran bahwa masyarakat telah dibuat tidak

berdaya oleh kekuatan dominan dan kontrol yang dimiliki oleh elit.

4. *Perspektif Post-Strukturalis*

Pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk membentuk kembali wacana yang berlaku, yang cenderung memprioritaskan intelektualisme daripada tindakan praktis. Ini dapat dipahami sebagai kemajuan menuju menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi baru.

Nugroho (2008) mengemukakan beberapa indikator pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Akses mengacu pada konsep hak universal untuk memanfaatkan atau mengakses sumber daya produktif yang ada di lingkungan tertentu.
2. Partisipasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pembuatan dan pemanfaatan aset sumber daya.
3. Kontrol menandakan adanya peluang bagi pria dan wanita untuk memberikan pengaruh dan otoritas atas pemanfaatan sumber daya.
4. Manfaat, di sisi lain, memerlukan prinsip kenikmatan yang adil dari pemanfaatan sumber daya dan pengembangan bersama oleh pria dan wanita.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Mardikanto (2013) mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*), Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan institusi, seperti pembentukan jaringan kemitraan bisnis.
2. Perbaikan Usaha (*Better Bussines*), Secara khusus, peningkatan dalam pendidikan, aksesibilitas, dan institusi diantisipasi untuk meningkatkan operasi bisnis.
3. Pendapatan (*Better Income*), Ketika operasi bisnis meningkat, akan ada peningkatan dalam pendapatan yang dihasilkan, yang mencakup pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*), Peningkatan pendapatan diproyeksikan untuk memperbaiki lingkungan (baik fisik maupun sosial), karena degradasi lingkungan sering dikaitkan dengan kemiskinan atau pendapatan terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*), Ketika tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan menguntungkan, ada harapan untuk meningkatkan standar hidup masing-masing keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat (*Better Community*), Kualitas hidup yang unggul, didukung oleh lingkungan yang kondusif, kemungkinan akan menghasilkan peningkatan keseluruhan dalam mata pencaharian masyarakat.

2.3.3 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.3.3.1 Pemberdayaan UMKM

Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Salah satu kebijakan mengenai UMKM yang baru disahkan yakni Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah.

PP No. 7 Tahun 2021 pasal 37:

- 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.
- 2) Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
- 3) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- 4) Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- 5) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 38:

- 1) Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:

1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan nonbank
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.3.3.2 Peraturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Deli Serdang

Salah satu peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah PERDA Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan Koperasi, UKM Kabupaten.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Deli Serdang. Yang dimana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Deli Serdang harus di dukung oleh suatu wadah yang kuat dalam bentuk badan usaha.

Dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang, pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha peranannya memiliki arti penting serta mempunyai kedudukan yang strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam demokrasi ekonomi.

Peranan dari kedudukan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang menjadi integral dari kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung peran strategis kelompok ekonomi rakyat dalam pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait koperasi, usaha kecil dan menengah.

2.3.3.3 Peran UMKM di Indonesia

Latar belakang sejarah ekonomi telah ditinjau kembali untuk menilai kembali keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). pertama ekonomi yang luar biasa di Jepang telah dikaitkan dengan skala sektor usaha kecil. Sebaliknya, dampak UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dianggap tidak signifikan. Negara-negara berkembang mulai mengalihkan fokus mereka untuk menganalisis peran dan dampak UMKM terhadap kemajuan ekonomi dengan mengamati pengalaman negara-negara berkembang lainnya. UMKM adalah pemain penting dalam mendorong kemajuan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju.

UMKM sangat penting karena mereka adalah pengusaha utama dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Di wilayah seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan bagi orang miskin, distribusi pendapatan yang merata, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan ekonomi pedesaan. Tambunan (2012) menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, inovasi, dan pengembangan teknologi, peran UMKM di negara sedang berkembang masih relatif rendah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka

saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektorsektor industri, perdagangan dan transportasi.

Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal.

Gambar 1

Jumlah UMKM Di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Gambar 1 dipaparkan data jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan gambar diatas bahwa jumlah UMKM di Indonesia bervariasi dari masing masing provinsi. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu sebesar 1.494.723 UMKM sedangkan provinsi papua hanya memiliki jumlah UMKM terendah sebesar 3.932 UMKM.

2.4 Industri Batu Bata

G. Kartasapoetra (1987) “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi”. Sedangkan menurut Sandi (2010) industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga

barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.

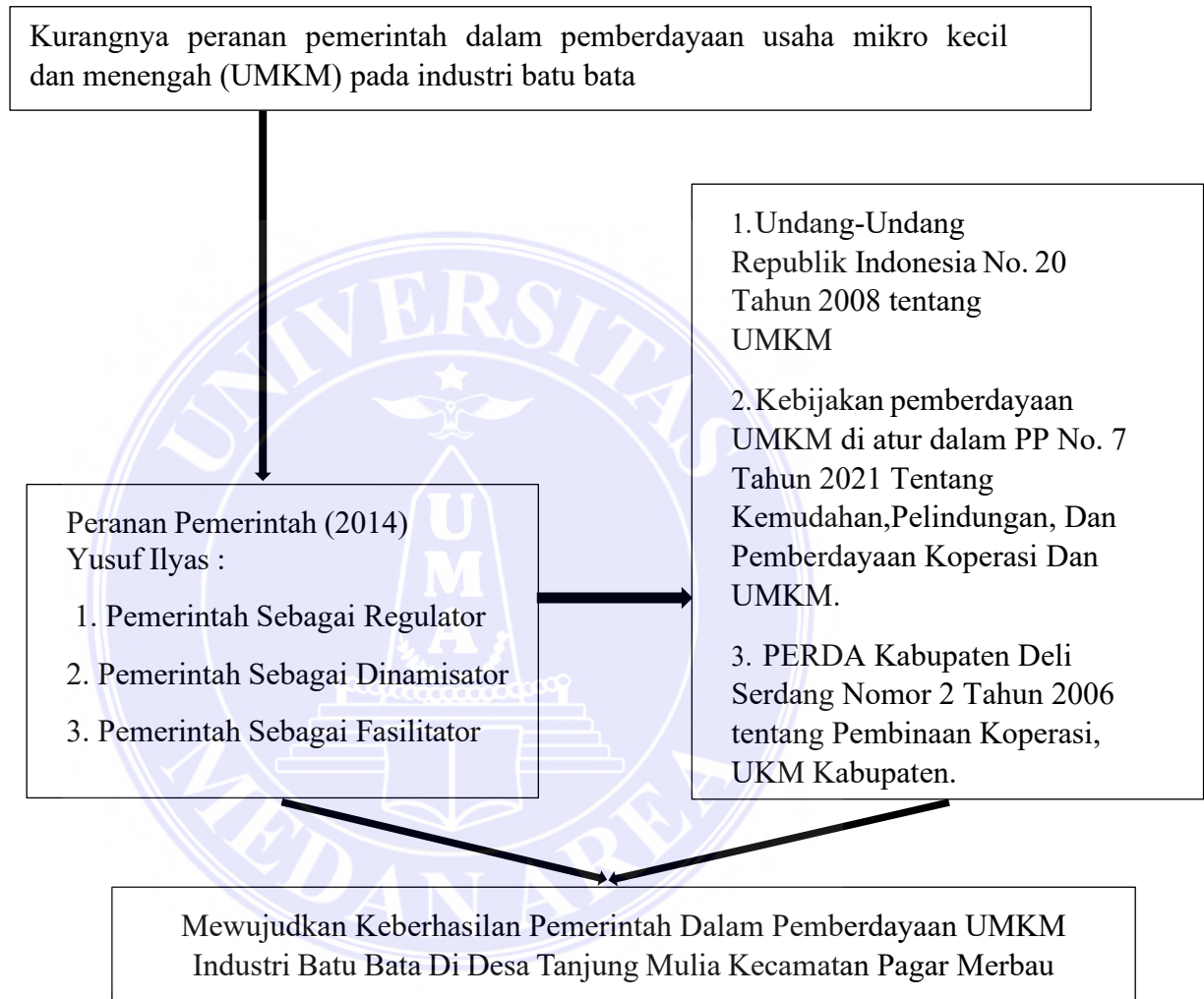
Definisi batu bata menurut SNI-2094-1991 merupakan unsur bahan bangunan yang digunakan untuk pembuatan konstruksi bangunan, dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar pada suhu yang cukup tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Menurut Handayani (2010), Batu bata merupakan bagian bangunan yang digunakan untuk membuat suatu bangunan, bahan berguna untuk membuat batu bata berasal dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain yang kemudian dibakar pada suhu tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.

Industri batu bata adalah proses produksi mengubah berbagai bentuk tanah liat menjadi benda lain berupa batu bata agar lebih efektif. Usaha Bata merupakan jenis usaha yang dapat dikembangkan karena usaha tersebut telah menciptakan lapangan kerja dan dapat mempekerjakan tenaga kerja di kota-kota kecil, Muslimin (2008). Industri batu bata merupakan pengelolaan yang bahan dasarnya dibuat dari tanah liat dengan proses yang cukup sederhana yaitu dengan mencetak dan menjemur diterik matahari lalu dibakar di tungku pembakaran. Industri batu bata ini adalah salah satu industri yang pesat perkembangannya, karena batu bata ini adalah bahan bangunan yang sering dibutuhkan dan sering digunakan untuk membuat pembangunan di dalam masyarakat.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Kerangka berpikir merupakan suatu alur peneliti sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan konteks dari penelitian agar lebih terarah. Kerangka berfikir diatas akan di terapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)”.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil
1	Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas /2019/Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberday aan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Umkm)	Metode: Deskriptif Kualitatif Variabel: Peranan Pemerintah Teori: Jim Ife dan Frank Tesoriero Fokus: Pemberdayaan UMKM Jumlah informan: 8 orang Teknik pengumpulan data: wawancara Teknik analisis data: reduksi data, penarikan kesimpulan Lokasi: Kabupaten Minahasa	Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi.
2.	Bellani Syahputri Siregar, Tomi Jaffisa/2020/Jur nal Publik Reform	Peranan Pemerintah Dalam Pemberday aan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Laut Dendang	Metode: deskriptif kualitatif Variabel: Peranan Pemerintah Teori: - Fokus: Pemberdayaan UMKM	Program UMKM dapat memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat khususnya ibu sehingga masyarakat menjadi kreatif.

No	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil
			<p>Jumlah Informan: 4 orang</p> <p>Teknik Pengumpulan data: wawancara, kuesioner, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web)</p> <p>Teknik Analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan</p> <p>Lokasi: desa laut dendang</p>	<p>produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Laut Dendang.dampak pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDes yang 20% dari keuntungan dialokasi kepada pendapatan desa dan BUMDes memberikan pinjaman modal kepada para ibu-ibu desa laut dendang maupun para pedagang.</p>
3	Alfain M. Rumondor,Fanley N. Pangemanan,Gu staf Undap/2023/jurnal governance	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Florikultura Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon	<p>Metode: deskriptif kualitatif</p> <p>Variabel: Peranan Pemerintah</p> <p>Teori: Mardikanto dan Soebianto (2019;144)</p> <p>Fokus: pemberdayaan petani florikultura</p> <p>Jumlah informan: -</p> <p>Teknik pengumpulan data:</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada Bina Manusia, dimana pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, pendidikan dan penyuluhan kepada petani sehingga bisa menghasilkan produk tanaman hias yang nantinya akan menaikkan kualitas SDM didalam</p>

No	Nama/Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil
			<p>data primer dan data sekunder</p> <p>Teknik Analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan</p> <p>Lokus: Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon</p>	<p>perekonomian juga nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan lokal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun dalam sarana prasarana tidak semua masyarakat petani mendapatkan bantuan, bantuan disalurkan hanya kepada petani yang masuk didalam kelompok tani saja.</p>
4	David J. J. D.Sabarofek, Lyndon R. J. Pangemanan, Mex L. Sondakh/2017/ jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Tani Holtikultura Di Kabupaten Biak Numfor	<p>Metode: deskriptif kualitatif</p> <p>Variabel: Peranan Pemerintah</p> <p>Teori: -</p> <p>Fokus: pemberdayaan usaha tani hortikultura</p> <p>Jumlah informan: 30 orang</p> <p>Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi</p> <p>Teknik analisis data: reduksi data,</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah dalam pemberdayaan usahatani hortikultura di Kabupaten Biak Numfor. Khususnya di Desa Dofyo Wafor, melalui Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pemberdayaan kepada petani,</p>

No	Nama/Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil
			penyajian data, penarikan kesimpulan Lokus: Desa Dofyo Wafor Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.	pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pengawas penangkar benih, pemberikan bantuan bibit unggul, sarana irigasi pengairan, pendorong kemajuan teknologi, pendampingan dalam pengelolaan lahan, dan pendampingan dalam kelembagaan petani.
5	Roro Merry Chornelia Wulandary, Yuli Andy Gani1, Hermawan/2015 /jurnal ilmu administrasi public	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberday aan Budaya Lokal (Studi tentang Program Pemberday aan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatk an Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten	Metode: deskriptif kualitatif Variabel: Peranan Pemerintah Teori: Suharto (2010: 58-59) Fokus: pemberdayaan budaya local Jumlah informan:- Teknik pengumpulan data: wawancara, dokumentasi dan observasi Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data,	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa kurang mampu meningkatkan pemberdayaan pengrajin batik Pamekasan jika ditinjau dari 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilitas. Bentuk program pemberdayaan pengrajin batik Pamekasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dalam bentuk program kerja yang sudah, sedang, dan akan

No	Nama/Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil
		Pamekasan- Madura)	uraian penarikan kesimpulan Lokus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pengrajin batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura.	dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi kendalal kendala dalam pemberdayaan pengrajin batik yaitu memberikan pelatihan, ikut serta dalam pameran dan studi banding ke daerah-daerah lain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Secara umum, yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu bahwa peneliti yang sekarang berfokus pada bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata, sedangkan sebagian dari penelitian terdahulu berfokus kepada pemberdayaan budaya lokal dan pemberdayaan kelompok tani. Selain itu jumlah dari informan juga berbeda, penggunaan teori yang berbeda serta lokusnya yang berbeda beda dan juga hasil dari penelitian yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2005) penelitian ini mengharuskan peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

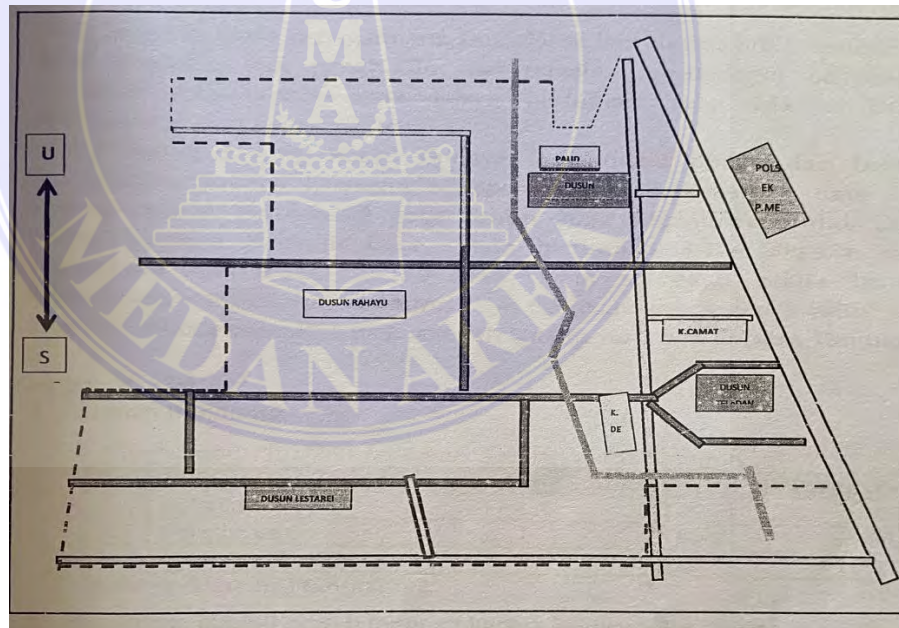
Penelitian pendekatan kualitatif ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek dan mengadakan interksi langsung dengan pemerintah dan masyarakat pengelola industri batu bata dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana peranan pemerintah dalam memberdayakan pelaku umkm khususnya pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 3
Denah Lokasi Penelitian



Sumber: Data Kantor Desa Tanjung Mulia

3.2.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3

Jadwal Penelitian

No	Uraian	2023		2024									
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pengajuan Data Awal	■											
2	Seminar Proposal			■									
3	Pengajuan Surat Penelitian			■									
4	Penelitian				■	■	■						
5	Seminar Hasil								■				
6	Perbaikan Seminar Hasil								■				
7	Bimbingan Skripsi									■			
8	Pendaftaran Sidang Skripsi									■			
9	Sidang Skripsi											■	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah seorang yang menjadi subjek penelitian dan mempunyai informasi serta mengetahui tentang permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti setelah ditentukannya lokasi penelitian. Menurut Creswell (2007) menyebutkan bahwa jumlah informan atau partisipan pada penelitian kualitatif biasanya 5 sampai 10 orang, namun apabila belum tercapai saturasi data maka jumlah partisipan dapat ditambah sampai terjadi pengulangan informasi dari partisipan. Informan penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan inti, informan utama dan informan tambahan.

Adapun penjelasan dari jenis informan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Sugiyono (2019), Informan inti merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi.
2. Menurut Sugiyono (2019), Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari.
3. Menurut Sugiyono (2019), Informan tambahan adalah siapa aja yang ditemukan di wilayah penelitian yang di duga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Tabel 4
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Bapak Rusli	Informan Kunci	Kepala Desa Tanjung Mulia
2	Bapak Gomgom Sidabutar, ST	Informan Utama	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang
3	1. Bapak Wagimin 2. Bapak Yanto 3. Bapak Sahrin 4. Bapak Ahmadi 5. Bapak Atam Rianto	Informan Tambahan	Masyarakat Pengelola UMKM Industri Batu Bata

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses mengumpulkan informasi, keterangan, atau detail yang relevan untuk tujuan tertentu. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara, atau pengumpulan data secara elektronik. kemudian data tersebut dapat dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan atau mengembangkan wawasan.

Pengumpulan data merupakan langkah kunci dalam proses pengembangan pengetahuan dan pengambilan keputusan, dan pengumpulan data yang baik memastikan data yang diperoleh lebih akurat, relevan dan bermanfaat. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis atau pemeriksaan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan berdasarkan fakta. Cresswell (2010) menyatakan bahwa observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Alasan peneliti menggunakan observasi dalam penelitian ini yaitu karena observasi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan fenomena yang sedang diamati. Selain itu teknik ini memudahkan peneliti dalam mengamati bagaimana peranan dari pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

2) Wawancara

Creswell (2018) menyatakan bahwa berwawancara peneliti bisa melakukan wawancara berhadapan-hadapan (*face-to-face interview*) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat wawancara dalam suatu kelompok (*focus group interview*). Wawancara adalah suatu metode komunikasi langsung dimana seseorang bertemu untuk berbicara langsung dengan satu orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang di teliti dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden yaitu:

1) Kepala Desa

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau untuk tujuan memperoleh informasi mengenai sejarah Desa Tanjung Mulia dan peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata serta faktor-faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM.

2) Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang

Penulis melakukan wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau. Penulis juga bertanya apa saja yang

menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata ini.

3) Masyarakat

Wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat UMKM khususnya industri batu bata terkait bagaimana peranan dari pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata. Penulis akan mengumpulkan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Penulis juga akan mempertanyakan faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil dari mencatat atau merekam informasi, data atau peristiwa yang melibatkan pengumpulan dan penyimpanan tertentu seperti tulisan, gambar, audio atau video. Dokumentasi ini penting untuk memvalidasi dan melacak semua langkah dalam penelitian, memungkinkan orang lain memahami, memeriksa atau mengulangi penelitian serta untuk publikasi dan referensi di masa depan.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto yang terkait dengan pemberdayaan UMKM Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tujuan dari analisis data penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

jelas tentang masalah penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data pada penelitian ialah proses mengumpulkan informasi atau keterangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. dengan cara mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, survei atau pengamatan langsung.

Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan hal-hal yang relevan berkaitan dengan peranan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM pada industri batu bata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengamatan langsung.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian adalah proses dimana peneliti mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan dan mempersempit dataset yang sudah dikumpulkan dengan menghilangkan informasi yang kurang relevan untuk memudahkan analisis data serta mengidentifikasi temuan penting.

Peneliti melakukan reduksi data dalam penelitian dengan menggambarkan keadaan yang faktual mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data penelitian merupakan proses mengkomunikasikan hasil penelitian pada pembaca menggunakan cara yang jelas, terstruktur serta informatif. Dengan tujuan untuk membuat hasil penelitian mudah dimengerti dan mendukung argument atau kesimpulan yang diambil dari data. Dengan demikian peneliti akan memahami sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusions*).

Menarik kesimpulan adalah tahapan penting dalam proses penelitian dimana peneliti menggabungkan hasil analisis data dengan tujuan penelitian untuk merumuskan jawaban atau kesimpulan yang berkaitan menggunakan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dengan cara melibatkan penarikan rangkuman, temuan, atau kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan serta di analisis.

3.6 Triangulasi Data

Sugioyono (2015) menyebutkan triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018) Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi data terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda, yaitu membandingkan pengamatan dengan hasil dari wawancara. Dalam hal ini membandingkan apa yang dikatakan pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan para masyarakat UMKM Industri Batu Bata.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk memperoleh data dengan hal yang berhubungan oleh perilaku manusia. dengan mendapatkan data melalui pengamatan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau terkait dengan UMKM industri batu bata.

3. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode untuk mengecek kebenaran data dengan temuan penelitian. peneliti membandingkan dari hasil wawancara yang telah diperoleh melalui informasi. Informasi mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM industri batu bata di Desa Tanjung Mulia.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 4

Triangulasi Sumber



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau sudah efektif, Hal ini bisa dilihat dari peranan pemerintah sebagai regulator, pemerintah telah memberikan bentuk perizinan usaha, bantuan modal usaha, selain itu bentuk pengawasan ketertiban keamanan proses pembuatan batu bata dan perlindungan iklim cuaca yang kondusif. Peranan pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah telah memberikan bentuk kontribusi dengan melakukan legalitas usaha dan melakukam sosialisasi untuk mengatur berjalannya proses produksi batu bata. Peranan pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah telah memberikan bentuk program kolaborasi dan fasilitas pemasaran dengan suatu kemitraan.
2. Faktor-faktor yang menghambat peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau yaitu kurangnya akses permodalan, proses produksi batu bata yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi, permasalahan produksi batu bata masih tergantung dari kondisi cuaca, dan daya saing penjualan batu bata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang akan diberikan penulis berikan dalam pemberdayaan UMKM pada industri batu bata di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau sebagai berikut:

1. Pemerintah kedepannya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat UMKM industri bata mengenai bantuan usaha. bantuan usaha yang diberikan bukan lagi berbentuk alat dan bahan untuk produksi batu bata, melainkan berupa dana. hal ini bertujuan agar masyarakat UMKM industri batu bata terhindar dari utang atau pinjaman-pinjaman bank. Selain itu pemerintah melakukan upaya untuk kestabilan pasaran harga batu bata agar tidak terjadi konflik dari para pemilik industri batu bata.
2. Untuk masyarakat UMKM industri batu bata, kedepannya lebih memperhatikan dan mempertahankan kualitas dari produk bata batanya agar menarik pelanggan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk meneliti tentang bagaimana UMKM industri batu bata dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J.W. (2005). *Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Reserach, Second Edition*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
- _____. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Apporoaches*. California: Sage Publication Inc.
- _____. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press. Yogyakarta.
- Iyas, Yusuf. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* edisi revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, T. (2008). *Paradigma Model Pendekatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda*. Malang: Lembaga Penerbitan Dan Dokumentasi FIA-Unibraw.
- Rivai,Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta:Grafindo.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Siagian, Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. (2012). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Standar Nasional Indonesia. (1991). *Mutu dan Cara Uji Batu Merah Pejal*. SNI 15-2094-1991.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alphabeta.

- Suharto, Edi. (2009). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Bandung: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. (Jakarta:Pustaka Kencana Prenada Media Group).

Jurnal

- Ahmad Redi, L.M. (2022). *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1), hal 282-292.
- Handayani. (2010). *Kualitas Batu Bata Merah Dengan Penambahan Serbuk Gergaji*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, Vol.12. No.1 Hal 41-50.
- Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal 62.
- Muslimin, A. (2008). *Dampak Industri Batu Bata Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Petani Pengusaha Industri Batu Bata di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). *Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM)*. Jurnal Eksekutif, 3(3).
- Rumondor, A. M., Pangemanan, F. N., & Undap, G. (2023). *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Florikultura di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*. Governance, 3(1).
- Sabarofek, D. J., Pangemanan, L. R., & Sondakh, M. L. (2017). *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usahatani Holtikultura di Kabupaten Biak Numfor*. Agri-Sosioekonomi, 13(3A), hal 227-242.
- Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Desa Laut Dendang*. Publik Reform, 7(1), hal 8-14.

Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), hal 103-115.

Wulandary, R. M. C., Gani, Y. A., & Hermawan, H. (2015). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura)*. *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies*, 18(3).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah.

Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan Koperasi, UKM Kabupaten

Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2020, yang menggambarkan struktur, tanggung jawab, dan prosedur operasional layanan koperasi dan usaha kecil hingga menengah di daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pelaksana mandat bidang koperasi, usaha kecil dan menengah guna terselenggaranya *good governance*.

Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM.

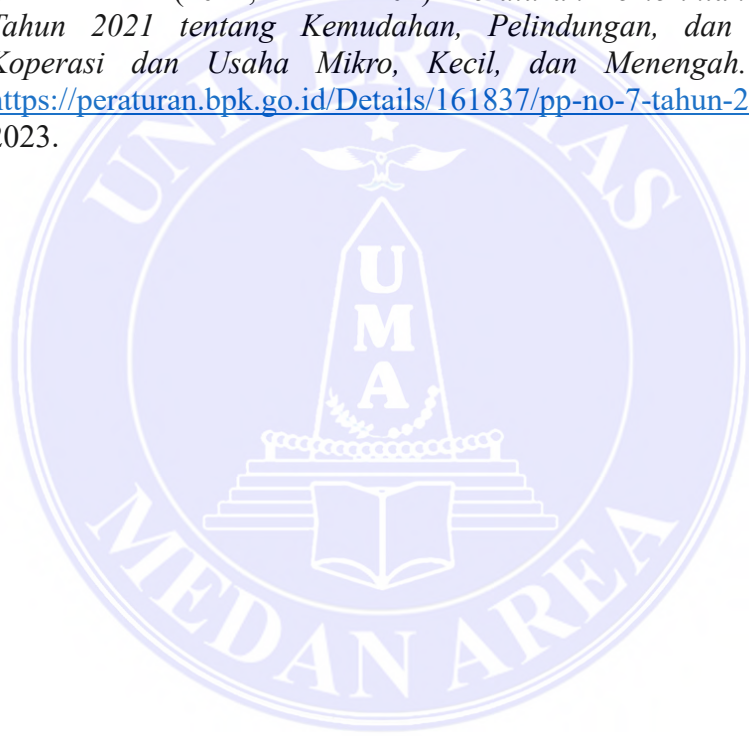
Website

Ariyanti, Lasmi. (2023, Juni 27). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM*. Diakses pada <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>, 18 Oktober 2023.

Juraidi., & Riza Mulyadi. (2023, Agustus 28). *Pemkab Deli Serdang Dorong UMKM Terus Berinovasi*. Diakses Pada <https://sumut.antaranews.com/berita/543996/pemkab-deli-serdang-dorong-umkm-terus-berinovasi>, 18 Oktober 2023.

Ki, Max. (2023, Desember 18). *Cara dan Syarat Mendaftar Nomor Induk Berusaha 2023*. Diakses Pada <https://umsu.ac.id/berita/cara-dan-syarat-mendaftar-nomor-induk-berusaha-nib-2023/>, 19 April 2024.

- Maulida, Rany. (2023, Februari 27). *Bantuan UMKM*. Diakses Pada <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/bantuan-umkm>, 19 April 2024.
- LG. (2020, Maret 02). *Perkembangan Jumlah Umkm Di Sumut Cukup Baik Sekitar 2,8 Juta Unit Usaha*. Diakses pada <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-2344-perkembangan-jumlah-umkm-di-sumut-cukup-baik-sekitar-28-juta-unit-usaha.html#>, 18 Oktober 2023.
- Riva. (2018, April 02). *Dorong Pertumbuhan UMKM untuk Wujudkan Kemandirian Ekonomi Sumut*. Diakses pada <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/dorong-pertumbuhan-umkm-untuk-wujudkan-kemandirian-ekonomi-sumut>, 18 Oktober 2023.
- Website, Sekretariat. (2021, Februari 02). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>, 18 Oktober 2023.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

I. Informan Kunci (Kepala Desa Tanjung Mulia)

a. Pemerintah Sebagai Regulator

1. Adakah bentuk perizinan usaha yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat umkm industri batu bata?
2. Adakah bentuk bantuan atau modal usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pengelola industri batu bata?
3. Adakah bentuk peraturan atau kebijakan yang diberikan pemerintah untuk pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
5. Apa saja hambatan dalam upaya pemberdayaan umkm pada industri batu bata?

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

1. Bagaimana kondisi perkembangan umkm industri batu bata pada saat ini?
2. Bagaimana partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
3. Bagaimana sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
4. Masalah masalah apa yang dikeluhkan masyarakat umkm industri batu bata?

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

1. Adakah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat untuk pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam memasarkan produk umkm industri batu bata?
3. Adakah bentuk pemberian fasilitas pemasaran dalam pengembangan pemberdayaan umkm industri batu bata?

II. Informan Utama (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang)

a. Pemerintah Sebagai Regulator

1. Adakah bentuk perizinan usaha yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat umkm industri batu bata?
2. Adakah bentuk bantuan atau modal usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pengelola industri batu bata?
3. Adakah bentuk peraturan atau kebijakan yang diberikan pemerintah untuk pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintah dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
5. Apa saja hambatan dalam upaya pemberdayaan umkm pada industri batu bata?

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

1. Bagaimana kondisi perkembangan umkm industri batu bata pada saat ini?
2. Bagaimana partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
3. Bagaimana sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
4. Masalah masalah apa yang dikeluhkan masyarakat umkm industri batu bata?

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

1. Adakah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat untuk pemberdayaan umkm pada industri batu bata?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam memasarkan produk umkm industri batu bata?
3. Adakah bentuk pemberian fasilitas pemasaran dalam pengembangan pemberdayaan umkm industri batu bata?

III. Informan Tambahan (Masyarakat UMKM Industri Batu Bata)

a. Pemerintah Sebagai Regulator

1. Apakah para masyarakat pengelola industri batu bata mengambil pinjaman untuk menjalankan usaha ini?
2. Apa saja keluhan masyarakat pengelola industri batu dalam menjalankan usaha ini?
3. Bagaimana cara masyarakat menyelesaikan masalah masalah dalam menjalankan usaha industri batu bata ini?

4. Apakah masyarakat merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan usaha industri batu bata pada saat ini?
2. Peran apa saja yang dilaksanakan selama ini dari pemerintah dalam pemberdayaan industri batu bata?
3. Apakah masyarakat telah merasakan dampak dari upaya pemberdayaan umkm industri batu bata yang diberikan oleh pemerintah?

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

1. Apakah ada bentuk keterlibatan dari masyarakat kepada pemerintah untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan umkm industri batu bata?
2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memasarkan produk industri batu bata ini?
3. Adakah inovasi dari para pengelola industri batu bata untuk mengembangkan dan memasarkan industri batu bata ini.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



The image shows a research permit letter from Universitas Medan Area, Faculty of Social and Political Sciences. The letter is dated January 25, 2024, and is addressed to the Village Head of Tanjung Mulia. It requests permission to collect data for a research project on the role of the government in supporting small businesses in the brick industry. The student's name is Mutia Aisyah Putri, NIM 208520074, and she is a Public Administration student. The letter is signed by the Dean, Dr. Waqid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 213/FIS.2/01.7/1/2024 Medan, 25 Januari 2024
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
**Kepala Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau
Di Tempat**

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : MUTIA AISYAH PUTRI
NIM : 208520074
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA INDUSTRI BATU BATA (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Waqid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 376/FIS.2/01.10/II/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 12 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mutia Aisyah Putri
NIM : 208520074
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau)"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

2. Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PAGAR MERBAU
DESA TANJUNG MULIA
KODE POS 20551**

Tanjung Mulia, 26 April 2024

Nomor : 301 /014/TM/IV/2024.
Hal : Penyelesai Riset

Kepada Yth. Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
di-
Tempat,-

Dengan hormat,-

Sehubungan dengan Pelaksanaan Riset dari Universitas Medan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik nomor : 213/FIS.2/01.7/I/2024 yang dilaksanakan oleh Mahasiswa :

Nama : MUTIA AISYAH PUTRI
NPM : 20850074
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Dusun Rahayu ,Desa Tanjung Mulia,Kecamatan Pagar Merbau.
Judul : Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Industri Batu Bata

Maka bersama ini Kepala Desa Tanjung Mulia Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan risetnya di Desa Tanjung Mulia.

Demikian Surat ini kami sampaikan kepada Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TANJUNG MULIA
KECAMATAN PAGAR MERBAU

RUSEI



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Karya Utama No. 4 Telp. 7951076 Email : diskopds@gmail.com
LUBUK PAKAM - 20514

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/581/ KUKM / IV / 2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

a Nama : ADELA SARI LUBIS,S.Tr.Keb.,M.K.M
b NIP : 19711111 199303 2 010
c Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
d Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Deli Serdang.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Mutia Aisyah Putri
NIK : 1207316102020004
Jurusan : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Judul : Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) pada Industri Batu Bata (Studi Kasus
Desa Tanjung Mulla Kecamatan Pagar Merbau).

Telah selesai melakukan Riset di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dari tanggal 20 Februari s/d 19 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



ADELA SARI LUBIS, S.Tr. Keb., M.K.M
PEMBINA
NIP. 197111111993032010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DATA PEMILIK INDUSTRI BATU BATA DI DESA TANJUNG MULIA

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat
1	Henro Kurniawan Se	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Desa Tanjung Mulia
2	Juni Kurnawan	Pengusaha Batu Bata	Dusun Lestari Desa Tanjung Mulia, Pagar Merbau
3	Zulian	Batu Bata	Dusun Teladan Tanjung Mulia
4	Muhadi	Batu Bata	Dusun Pembangunan Tanjung Mulia
5	Sunardi	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
6	Ridwan	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
7	Atam Rianto	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
8	Suwoto	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
9	Sahrin	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
10	Ahmadi	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
11	Jayanto	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
12	Rusmin	Pembuatan Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
13	Okta Viani	Pembuat Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
14	Abdul Karim Purba	Pembuatan Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
15	Muliadi	Pembuatan Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
16	Nanang Suriadi	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
17	Yanto	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
18	Paiman	Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
19	Kasijan	Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
20	Adimansur Barus	Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
21	Srianto	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Tanjung Mulia
22	Sumardi	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
23	Rusli	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
24	Supriyadi	Batu Bata	Dusun Lestari Tanjung Mulia
25	Sunarwan	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
26	Poniran	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
27	Sugito	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
28	Dario	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
29	Hirpansyah	Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Tanjung Mulia
30	Tupon	Kilang Batu Bata	Dusun Lestari Tanjung Mulia

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat
31	Zulian	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Teladan, Pagar Merbau
32	Muhadi	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Pembangunan, Pagar Merbau
33	Sunardi	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
34	Ridwan	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
35	Atam Rianto	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
36	Sahrin	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
37	Ahmadi	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
38	Jayanto	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
39	Rusmin	Pembuatan Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
40	Okta Viani	Pembuat Batu	Tg. Mulia Dsn. Rahayu,
41	Abdul Karim Purba	Pembuatan Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Teladan, Pagar Merbau
42	Muliadi	Pembuatan Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
43	Nanang Suriadi	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
44	Dedi Hermsyah	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
45	Paiman	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
46	Kasijan	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
47	Adimansur Barus	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
48	Srianto	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Rahayu, Pagar Merbau
49	Sumardi	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
50	Rusli	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
51	Supriyadi	Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
52	Sunarwan	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
53	Poniran	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
54	Sugito	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
55	Dario	Batu Bata Mesin	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
56	Irfansyah	Kilang Batu Bata Mesin	Tanjung Mulia, Dusun Lestari, Pagar Merbau

No.	Nama	Nama Usaha	Alamat
57	Tupon	Kilang Batu Bata	Tg. Mulia Dsn. Lestari, Pagar Merbau
58	Rommy Andrean	Batu Bata	Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau
59	Muhammad Adi Saputra	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau
60	Boniar	Jual Batu Bata Dan Pasir	Tanjung Mulia, Pagar Merbau, Deli Serdang,
61	Muhammad Fikri Triatma	Kilang Batu Bata Mesin	Dusun Rahayu, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau
62	Hamdani Purba	Pengrajin Batu Bata	Dusun Teladan, Tanjung Mulia, Pagar Merbau
63	Sumaji	Pembuat Batu Bata	Desa Tanjung Mulia, Kec. Pagar Merbau,
64	Riki Andriawan	Kilang Batu Bata	Dusun Rahayu, Tanjung Mulia, Pagar Merbau
65	Sunarman	Kilang Batu Bata Mesin	Dusun Lestari Desa Tanjung Mulia, Pagar Merbau
66	Wagimin	Jual Beli Batu	Dusun Rahayu Desa Tanjung Mula
67	Rudiyanto	Jual Beli Batu Bata	Dusun Teladan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau
68	Suryani	Angkutan Motor Bafu Bata	Dusun Teladan, Tanjung Mulia, Pagar Merbau
69	Jumiran	Wiraswasta Batu Bata	Dusun Lestari Desa Tanjung Mulia, Tanjung Mulia, Pagar Merbau
70	Legia	Kilang Batu Bata Nesin	Tanjung Mulia, Dusun Lestari, Pagar Merbau
71	Jumin	Pengerajin Batu Bata	Dusun Pembangunan, Tanjung Mulia, Pagar Merbau

Sumber: Data Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Deli Serdang

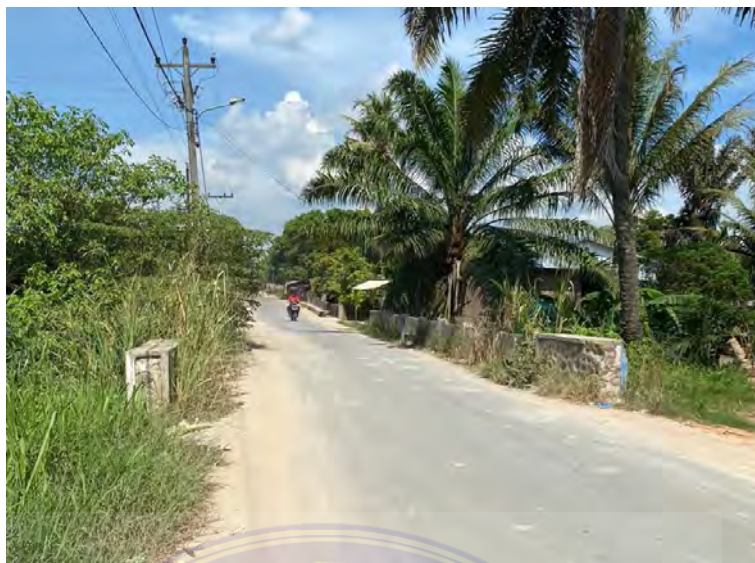
PENJELASAN INDIKATOR



Bentuk Pengawasan Dari Pemerintah Mengenai Letak Bahan Baku Batu Bata Yang Tidak Tertib (Melewati Badan Jalan)
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Bentuk Kontribusi Dari Pemerintah Memberikan Jalan Khusus Untuk Transportasi Produksi Batu Bata.
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dengan Pihak Pemerintah Yang Pernah Dilakukan Membangun Titi Atau Jembatan

(Sumber: Dokumen Pribadi,2024)



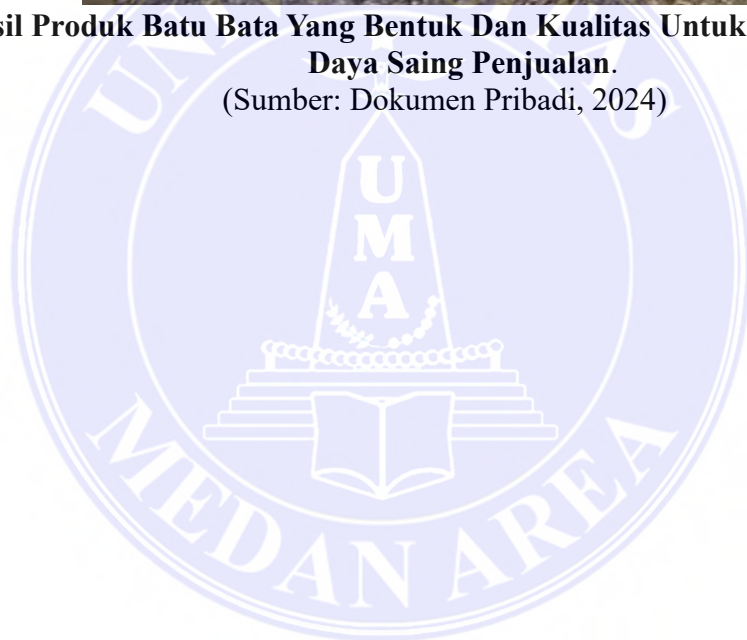
Produksi Batu Bata Yang Gagal Dan Kondisi Batu Bata Pada Saat Hujan Deras

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Hasil Produk Batu Bata Yang Bentuk Dan Kualitas Untuk Meningkatkan Daya Saing Penjualan.

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Tanjung Mulia
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



**Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM
Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Deli Serdang**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Wagimin
(Masyarakat Industri Batu Bata)**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Sahrin
(Masyarakat Industri Batu Bata)**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Aseng
(Masyarakat Industri Batu Bata)**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



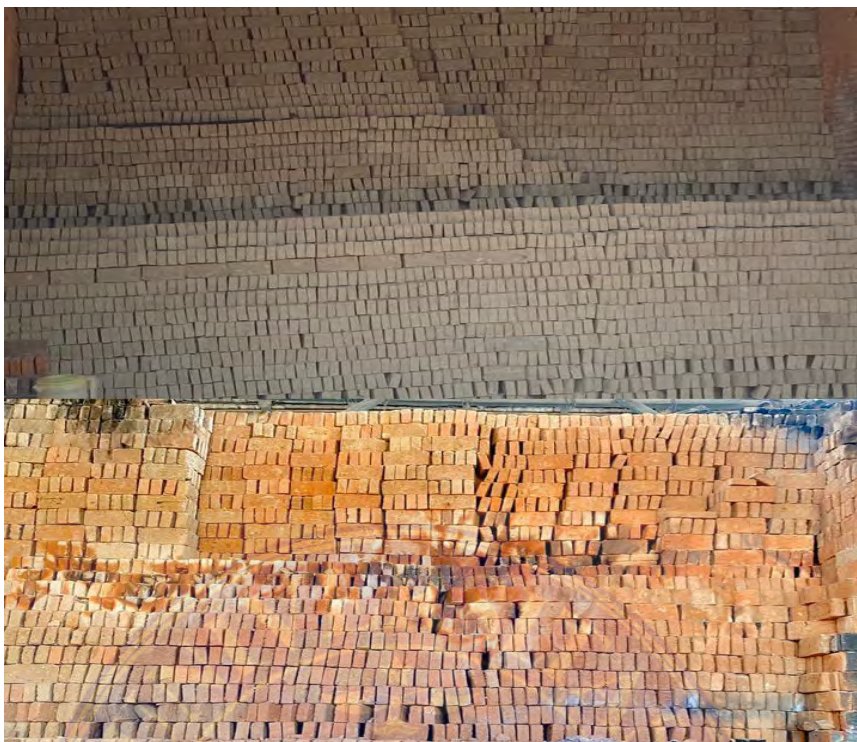
**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Atam Rianto
(Masyarakat Industri Batu Bata)**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Ahmadi
(Masyarakat Industri Batu Bata)**
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



Dokumentasi Contoh Tempat Industri Batu Bata
Sumber: Dokumen Pribadi, 2024



Dokumentasi Batu Bata Mentah dan Hasil Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Dapur Pembakaran Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Proses Pembakaran Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi 2024)



Dokumentasi Proses Pembuatan Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Mesin Dan Alat Pemotongan Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi 2024)



Dokumentasi Proses Penjemuran Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Bahan Baku Pembuatan Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Bahan Bakar Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Angkutan Muatan Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)



Dokumentasi Angkutan Bahan Baku Produksi Batu Bata
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)